



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8

2.1 Gambaran Pelayanan 8

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8

2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .. 13

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 28

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 33

2.1.5 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 34

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 35

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu 35

2.2.2 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ... 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 44

3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun 2025-2029 44

3.2 Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun 2025-2029 46

3.3 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 48

3.4 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN 59

4.1 Uraian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun 2025-2029 59

4.2 Uraian Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 62

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 81

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 120

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 127

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 131

BAB V PENUTUP 133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan.....	13
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.....	29
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.....	32
Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 2.6 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.....	45
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	47
Tabel 3.3 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	49
Tabel 3.4 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	52
Tabel 3.6 Pentahapan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58
Tabel 4.1 Rencana Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029	60
Tabel 4.2 Rencana Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029	64
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2025-2029	82
Tabel 4.4 Program Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.....	128
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	14

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan pengalokasian serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar tujuan akhir yang hendak dicapai dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan adanya sebuah perencanaan yang sistematis baik melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan yang matang serta disusun secara sistematis akan berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah diamanatkan tentang pentingnya suatu perencanaan strategis ditingkat unit kerja sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai bahan serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga setiap Perangkat Daerah harus mampu menerjemahkan serta menginterpretasikan visi, misi maupun agenda RPJMD berikut strategi, arah kebijakan dan target pencapaian program yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan menjadi pedoman serta acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam periode pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2021-2026, sekaligus menjadi tahun awal periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 seiring dengan pergantian estafet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunungkidul. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang akan berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul ini disusun berdasarkan pedoman sesuai Surat Edaran Kepala Daerah. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan serta pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis DPMPTSP selama periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra DPMPTSP disusun dengan menyelaraskan pada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sesuai dengan bidang urusan yang diampu sebagai bagian dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan memperhatikan pula keselarasan maupun sinkronisasi program kegiatan pada Rencana Kerja K/L serta Perangkat Daerah ditingkat Provinsi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Surat Edaran Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan serta pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan organisasi, mengantisipasi dinamika maupun perkembangan situasi dan kondisi daerah, serta kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
- b. Menyelaraskan perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun serta melaksanakan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Sebagai instrumen pengelolaan keberhasilan, pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi atas target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sub bab ini diuraikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 serta sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pada sub bab ini diuraikan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, mulai dari dasar hukum ditingkat Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini diuraikan maksud dan tujuan apa yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini diuraikan bagaimana sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Gambaran Pelayanan

Pada sub bab ini diuraikan mengenai Gambaran umum pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik dari segi komposisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan secara rinci tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

- 2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan komposisi sumber daya manusia baik menurut pangkat, golongan serta jenjang pendidikan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Selain itu pada sub bab ini juga diuraikan secara rinci sarana dan prasarana pendukung kinerja yang dijabarkan dari data aset Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan mengenai kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul serta capaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan siapa saja kelompok sasaran dari layanan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
- 2.1.5 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan bagaimana peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci mengenai permasalahan yang dihadapi dibidang penanaman modal serta pelayanan publik sebagai *core business* dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2.2 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci mengenai isu-isu strategis bidang penanaman modal serta pelayanan publik di lingkup Kabupaten Gunungkidul sebagai *core business* dan juga kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029
Pada sub bab ini diuraikan tujuan apa yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama periode Renstra Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci mengenai sasaran per tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama periode Renstra Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci mengenai bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran Perangkat Daerah yang tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci mengenai bagaimana arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran Perangkat Daerah yang tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Uraian Program
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci program prioritas serta program penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
- 4.2 Uraian Kegiatan
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci kegiatan-kegiatan prioritas serta kegiatan-kegiatan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci sub kegiatan prioritas serta pendukung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan masing-masing indikator kinerja, target, maupun pagu indikatif untuk setiap tahunnya

- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci sub kegiatan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah selaras dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul maupun Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan secara rinci target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selama periode Renstra Tahun 2025-2029
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada sub bab ini diuraikan mengenai target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode Renstra Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur, mengurus, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah telah memberikan ruang sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk menarik investasi guna mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi investor, serta mengembangkan iklim investasi yang sehat.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa terus berinovasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Gunungkidul serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang telah beroperasi sejak tahun 2020, terbukti dapat meningkatkan kualitas Pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang memiliki trend meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah pengunjung sebagai pengguna layanan MPP juga mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah booth/gerai layanan dari lintas Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal lainnya.

Kedepan, menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pada pengembangan potensi lokal serta berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaras dengan dukungan dalam pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
8. Pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan promosi penanaman modal;
10. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal;
11. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
12. Pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, meliputi :
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan regulasi dan kebijakan penanaman modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan investasi;
 - c. penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
 - d. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan promosi, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi penanaman modal dan pengembangan investasi; dan
 - h. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan penanaman modal dan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelaksanaan tugas bidang promosi, meliputi :
 - a. penyiapan penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
 - b. penyiapan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - c. penyampaian informasi penanaman modal;
 - d. penyusunan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. penyiapan pengiriman misi dan delegasi ke luar daerah atau luar negeri;
 - f. penyiapan penerimaan misi dan delegasi dari luar negeri; dan
 - g. pelaksanaan forum temu usaha bagi penanam modal;
14. Pelaksanaan tugas bidang pengembangan investasi, meliputi :
 - a. penetapan bidang usaha unggulan dan prioritas;
 - b. penyusunan peta potensi unggulan dan profil investasi;
 - c. pelaksanaan pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - d. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan investasi;

- e. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan pengembangan investasi;
 - f. penyiapan bahan pengembangan potensi dan peluang investasi;
 - g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan investasi; dan
 - h. penyusunan laporan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
15. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu I, meliputi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, penanaman modal, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pendaftaran perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - j. pengelolaan, analisis, dan data pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - l. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan sistem informasi perizinan, non perizinan dan penanaman modal; dan
 - m. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepda masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
16. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan, meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. penyiapan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan.
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - f. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan non perizinan;

- g. pelaksanaan pelayanan legalisasi perizinan dan non perizinan;
 - h. pelaksanaan kajian tentang peningkatan pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan; dan
 - i. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
17. Pelaksanaan tugas bidang data, meliputi :
- a. penyusunan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - b. pengolahan data perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data;
 - d. penyiapan bahan dan data untuk koordinasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - e. penyusunan telaah dan berita acara hasil survei;
 - f. penerbitan dokumen layanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara berkala;
 - h. pelaksanaan dan pengelolaan pemutakhiran data base dalam sistem informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dokumen;
 - j. penerbitan surat ketetapan retribusi Daerah; dan
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal dan pelayanan perizinan;
18. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu II, meliputi:
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-Undangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan penanganan pengaduan; dan
 - e. pelaporan pengendalian dan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan advokasi, meliputi :
- a. pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
 - b. pelaksanaan penanganan pengaduan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terkait pelayanan pengaduan dan advokasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengaduan; dan
 - e. penyusunan laporan penanganan pengaduan;
20. Pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan evaluasi, meliputi:
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal;
 - b. peningkatan dan pemantauan proses tanggung jawab sosial perusahaan;

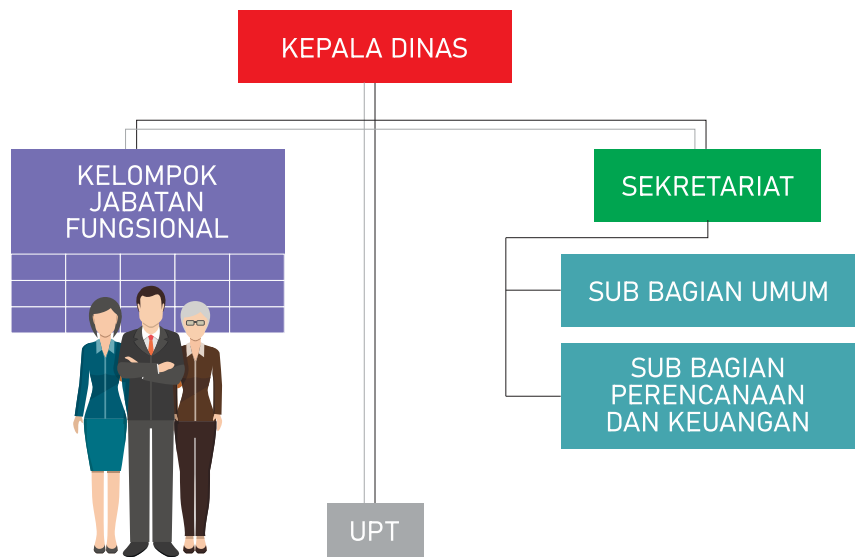
- c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengendalian perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - e. penyiapan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
 - f. penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian penanaman modal dan evaluasi terhadap izin yang sudah diterbitkan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian penanaman modal; dan
 - h. pelaporan pengendalian dan evaluasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
21. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan dinas;
 22. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 23. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 24. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 25. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 26. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
 27. Pengelolaan UPT.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - Subbagian Umum; dan
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. UPT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia sebagai pilar penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan aset penting bagi organisasi, karena peran dan fungsinya tidak dapat digantikan dengan sumber daya yang lain dan tentunya harus berorientasi pada visi, misi maupun tujuan organisasi. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan akhir tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut :

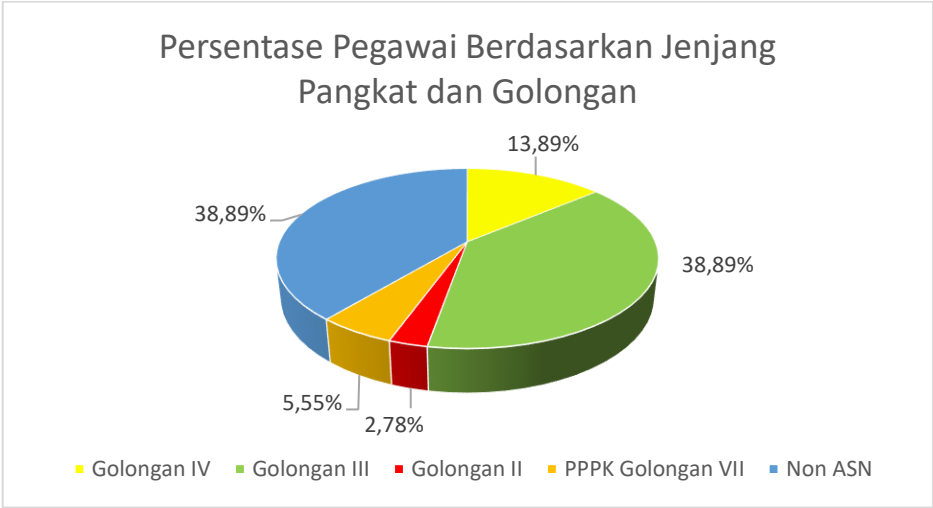
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pegawai yang ada				Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
			S2	S1	D3	SMA	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	-	-	-	1
B.	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	1	1	-	-	-	1
	2. Pengawas	1	-	1	-	-	1
	3. Pelaksana	20	-	9	6	5	13
C.	Jabatan Fungsional	13	4	9	-	-	7
	Jumlah	36	6	19	6	5	21

Sumber : Data Kepegawaian Sub Bagian Umum DPMPSTP Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu relatif tinggi dan hampir merata antara Laki-laki dan Perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (52,78%), disusul oleh jenjang pendidikan D3 dan S2 masing-masing sebanyak 6 orang (16,67%) dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 5 orang (13,89%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, akan tetapi komposisi untuk jabatan baik administrator, pengawas maupun Jabatan Fungsional didominasi oleh pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul baik ASN maupun Non ASN berjumlah 36 orang yang terdiri dari 22 orang ASN (20 orang PNS dan 2 orang PPPK) serta 14 orang Tenaga Non ASN. Pada akhir tahun 2024, jabatan fungsional sudah mulai terisi melalui mekanisme *inpassing*. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan



Sumber : Data Kepegawaian Sub Bagian Umum DPMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan data pada gambar 2.2 komposisi pegawai PNS dengan Golongan IV ada sebanyak 5 orang (13,89%), PNS Golongan III sebanyak 14 orang (38,89%), PNS Golongan II sebanyak 1 orang (2,78%), PPPK Golongan VII sebanyak 2 orang (5,55%) serta Pegawai Non ASN sebanyak 14 orang (38,89%). Secara komposisi pegawai, jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejumlah 22 orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan 2 orang PPPK, didukung oleh 14 orang pegawai Non ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- B. Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sarana dan Prasarana yang tersedia sampai dengan akhir tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mendukung pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Station Wagon	Toyota Rush G 1.5 Manual	Belanja Modal	2017	1	230.104.459
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Kijang Ino	Belanja Modal	2001	1	167.629.000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota	Belanja Modal	2012	1	173.749.900
4	Sepeda Motor	Suzuki Shogun	Belanja Modal	2009	2	24.274.852
5	Sepeda Motor	HONDA/ Supra X 125 D	Belanja Modal	2013	1	13.990.000
6	Sepeda Motor	HONDA/ NF 125 TD	Belanja Modal	2008	1	14.350.000
7	Sepeda Motor	HONDA/ Supra X 125	Belanja Modal	2014	1	14.570.200
8	Sepeda Motor	YAMAHA/ JUPITER Z CW FI	Belanja Modal	2017	2	32.900.000
9	Sepeda Motor	YAMAHA JUPITER Z CW FI	Belanja Modal	2019	1	16.506.000
10	Sepeda Motor	YAMAHA YUPITER Z CW F1	Belanja Modal	2019	1	16.506.000
11	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125 F1 CW 2017	Belanja Modal	2017	1	16.824.500
12	Genset	Genzet Silent 6800 MATRIX	Belanja Modal	2017	1	15.000.000
13	Laser Ace		Belanja Modal	2018	1	15.180.000
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Olympia	Belanja Modal	2007	1	1.800.000
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Olympia / Carina 3	Belanja Modal	2007	1	1.800.000
16	Rak Besi	--	Belanja Modal	2014	1	1.491.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Rak Besi	--	Belanja Modal	2014	1	2.982.000
18	Rak Besi		Belanja Modal	2017	2	8.000.000
19	Rak Kayu		Belanja Modal	2016	1	400.000
20	Rak Kayu		Belanja Modal	2010	1	600.000
21	Rak Kayu	--	Belanja Modal	2012	1	950.000
22	Rak Kayu		Belanja Modal	2017	1	975.000
23	Rak Kayu		Belanja Modal	2010	3	3.900.000
24	Rak Kayu		Belanja Modal	2018	1	2.808.000
25	Rak Kayu		Belanja Modal	2018	1	5.013.000
26	Filing Cabinet Besi	Brother	Belanja Modal	2007	4	5.600.000
27	Filing Cabinet Besi	BROTHER	Belanja Modal	2009	1	1.485.000
28	Filing Cabinet Besi	BROTHER	Belanja Modal	2010	1	1.650.000
29	Filing Cabinet Besi	Importa	Belanja Modal	2023	1	1.675.000
30	Filing Cabinet Besi	BROTHER	Belanja Modal	2009	1	1.790.000
31	Filing Cabinet Besi	Rione	Belanja Modal	2018	4	8.430.000
32	Filing Cabinet Besi	lion	Belanja Modal	2016	1	2.497.000
33	Filing Cabinet Besi	DATAFILE	Belanja Modal	2019	5	14.869.800
34	Lemari Display		Belanja Modal	2021	1	3.164.700
35	Lemari Display		Belanja Modal	2021	1	4.087.600
36	Lemari Display		Belanja Modal	2020	1	7.000.000
37	Lemari Sorok	Brother	Belanja Modal	2017	3	89.100.000
38	Lemari Sorok	Brother MFB-4 BS 20 COMP	Belanja Modal	2019	2	59.680.300
39	Lemari Kaca	--	Belanja Modal	2012	2	3.500.000
40	Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Saran		Belanja Non Modal	2016	1	516.000
41	Kotak Obat/Kotak Surat/Kotak Saran		Belanja Non Modal	2016	2	1.879.250
42	Alat Penghancur Kertas	Gemet 1000c	Belanja Modal	2012	1	1.500.000
43	LCD Projector/Infocus	Epson EB-X400	Belanja Modal	2019	2	15.019.800
44	Mesin Antrian	KIOSK	Belanja Modal	2023	1	24.950.000
45	Mesin Antrian	KIOSK	Belanja Modal	2021	1	46.117.500

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	Papan Nama Instansi		Belanja Non Modal	2016	1	700.000
47	Papan Nama Instansi		Belanja Modal	2017	2	5.308.000
48	Papan Nama Instansi		Belanja Modal	2017	1	3.185.000
49	Papan Nama Instansi		Belanja Modal	2017	1	5.755.500
50	Papan Nama Instansi		Belanja Modal	2017	1	6.967.500
51	Papan Nama Instansi		Belanja Modal	2022	1	29.345.483
52	Papan Nama Instansi		Belanja Modal	2017	1	38.319.000
53	Papan Pengumuman	--	Belanja Modal	2013	1	605.000
54	Papan Pengumuman		Belanja Non Modal	2019	1	1.320.000
55	Papan Pengumuman		Belanja Non Modal	2019	3	4.950.000
56	Papan Pengumuman		Belanja Non Modal	2019	1	3.506.120
57	Breket dan Perlengkapannya (perlengkapan LCD)		Belanja Modal	2019	3	991.200
58	Breket dan Perlengkapannya (perlengkapan LCD)		Belanja Modal	2021	4	11.000.000
59	Meja Kerja Kayu	-	Belanja Modal	2020	4	5.707.900
60	Meja Kerja Kayu	-	Belanja Modal	2020	4	17.490.000
61	Sice		Belanja Modal	2007	1	4.000.000
62	Sice		Belanja Modal	2018	2	17.042.000
63	Sice		Belanja Modal	2017	1	9.900.000
64	Meja Rapat		uncategorized	2007	4	2.000.000
65	Meja Rapat		uncategorized	2008	1	500.000
66	Meja Rapat		Belanja Modal	2017	10	9.900.000
67	Meja Rapat		Belanja Modal	2017	6	5.987.550
68	Meja Rapat		Belanja Modal	2019	8	11.895.650
69	Meja Rapat		Belanja Modal	2021	8	14.469.664
70	Meja Rapat		Belanja Modal	2018	2	12.023.000
71	Meja Resepsionis	--	Belanja Modal	2007	1	3.300.000
72	Meja Resepsionis		Belanja Modal	2021	6	29.080.728

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Meja Resepsionis	-	Belanja Modal	2020	1	7.617.500
74	Meja 1/2 Biro	--	Belanja Modal	2007	19	9.500.000
75	Meja 1/2 Biro		Belanja Modal	2023	3	3.300.000
76	Meja 1/2 Biro		Belanja Modal	2021	6	6.926.040
77	Kursi Rapat		uncategorized	2007	4	800.000
78	Kursi Rapat		uncategorized	2008	10	2.000.000
79	Kursi Rapat	Futura	Belanja Modal	2017	20	8.920.000
80	Kursi Rapat	Chitose	Belanja Modal	2017	25	11.250.000
81	Kursi Rapat		Belanja Modal	2019	30	44.774.400
82	Kursi Tamu		Belanja Modal	2021	6	4.554.000
83	Kursi Tamu	--	Belanja Modal	2007	13	11.943.750
84	Kursi Tamu		Belanja Modal	2018	10	15.994.000
85	Kursi Putar	Starseat	Belanja Modal	2007	7	4.550.000
86	Kursi Putar		Belanja Modal	2021	24	18.414.000
87	Kursi Putar	KS-871-HTK	Belanja Modal	2020	6	8.712.000
88	Kursi Putar		Belanja Modal	2018	4	14.540.000
89	Kursi Biasa		Belanja Modal	2021	18	6.033.060
90	Meja Komputer	--	Belanja Modal	2014	1	1.000.000
91	Sofa		Belanja Modal	2021	8	54.232.200
92	Sofa		Belanja Modal	2019	1	8.976.500
93	Sofa		Belanja Modal	2020	2	28.380.000
94	Rak Kayu		Belanja Modal	2018	2	7.997.000
95	Lemari Rias		Belanja Modal	2019	1	1.101.700
96	Gorden		Belanja Non Modal	2017	1	5.120.000
97	Gorden		Belanja Non Modal	2019	1	22.412.500
98	Meja Biro	--	Belanja Modal	2007	2	2.000.000
99	Kursi Tunggu		Belanja Modal	2021	100	83.574.700
100	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	--	Belanja Modal	2007	17	2.550.000
101	Jam Elektronik	Sakana	Belanja Modal	2007	1	100.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Panasonic	Belanja Modal	2021	4	24.000.000
103	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Panasonic CS/CU-J45FFP8, Standing Floor	Belanja Modal	2021	6	182.655.000
104	Ac Unit	Sharp	Belanja Modal	2018	1	3.839.000
105	Ac Unit	Panasonic	Belanja Modal	2008	2	8.700.000
106	Ac Unit	Panasonic	Belanja Modal	2017	5	24.900.000
107	Ac Unit	Sharp	Belanja Modal	2018	4	20.900.000
108	Ac Unit	Sharp	Belanja Modal	2019	10	54.962.600
109	Ac Unit	Panasonic	Belanja Modal	2007	2	11.600.000
110	Kompore Gas (Alat Dapur)		Belanja Modal	2022	1	1.000.000
111	Alat Dapur Lainnya		Belanja Modal	2022	1	21.744.000
112	Televisi	POLYTRON	Belanja Modal	2023	1	2.750.000
113	Televisi	POLYTRON	Belanja Modal	2024	1	4.000.000
114	Televisi	LG	Belanja Modal	2023	1	4.700.000
115	Televisi	LG	Belanja Modal	2021	4	21.472.000
116	Televisi	POLYTRON	Belanja Modal	2023	2	14.200.000
117	Televisi	SAMSUNG UA50TU8000	Belanja Modal	2020	2	19.800.000
118	Televisi	Panasonic	Belanja Modal	2019	1	10.992.500
119	Televisi	Sony	Belanja Modal	2019	1	45.604.200
120	Amplifier	JBL	Belanja Modal	2019	1	12.117.000
121	Loudspeaker	JBL	Belanja Modal	2019	1	8.151.500
122	Loudspeaker	JBL	Belanja Modal	2019	1	8.261.600
123	Wireless	Baretone	Belanja Modal	2019	1	3.194.500
124	Microphone	TOA	Belanja Modal	2018	3	993.000
125	Unit Power Supply	Prolink	Belanja Modal	2021	20	27.000.000
126	Unit Power Supply	APC	Belanja Modal	2018	1	19.855.000
127	Tangga Aluminium	--	Belanja Non Modal	2015	1	480.000
128	Lambang Instansi	--	Belanja Modal	2007	1	200.000
129	DVD Player		Belanja Modal	2019	1	5.507.700

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130	GPS (Global Positioning System)	44103103-PKM-004773600 GARMIN	Belanja Modal	2019	1	10.014.550
131	Pompa Kebakaran/Portable	TONATA ABC POWDER	Belanja Modal	2023	6	1.470.000
132	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Belanja Modal	2017	11	24.200.000
133	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Belanja Modal	2018	1	20.053.000
134	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		Belanja Modal	2017	11	21.780.000
135	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Lokal	Belanja Modal	2019	1	4.806.500
136	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	--	Belanja Modal	2007	2	2.700.000
137	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		Belanja Modal	2007	2	3.000.000
138	Microphone/Wireless MIC	TOA	Belanja Modal	2011	1	5.000.000
139	Professional Sound System	Rockly	Belanja Modal	2022	3	38.700.000
140	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC UPS BX1100-MS	Blockgrant	2015	3	5.763.780
141	Digital LED Running Text		Belanja Modal	2023	1	2.779.375
142	Digital LED Running Text		Belanja Modal	2023	1	2.855.142
143	Camera Digital	SONY DSC H400	Belanja Modal	2017	1	4.440.000
144	Proyektor + Attachment	Tosiba YC 2500	Belanja Modal	2008	1	17.500.000
145	Telephone (PABX)	Panasonic KX-TES 824	Belanja Modal	2017	1	7.985.000
146	Telephone (PABX)	Panasonic TES 824	Belanja Modal	2020	1	13.915.000
147	Pesawat Telephone	Panasonic, KX-TS505MX	Belanja Modal	2021	7	2.170.000
148	Facsimile	panasonic FP 701	Belanja Modal	2016	1	1.798.000
149	Antene UHF Portable		Belanja Modal	2019	1	275.400
150	Concrete Hammer Set	Controls	Belanja Modal	2018	1	17.380.000
151	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	AD68	BTT(hanya boleh diinput melalui user OPD BTT)	2020	1	784.000
152	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Alicn Med Seri AET-R1B1	BTT(hanya boleh diinput melalui user OPD BTT)	2020	1	2.500.000
153	PC Workstation	L:ENOVO	Belanja Modal	2020	7	112.420.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
154	P.C Unit	Simbada / Samsung	Belanja Modal	2007	1	3.000.000
155	P.C Unit	Intel E 550, IGB, 320GB, DVDRW, LOD, Acer X 163 Wifi)	Belanja Modal	2011	1	3.960.000
156	P.C Unit		Belanja Modal	2010	2	12.110.000
157	P.C Unit	Acer	Blockgrant	2010	1	6.550.000
158	P.C Unit	Acer Aspire M 3910	Belanja Modal	2011	1	6.601.889
159	P.C Unit		Belanja Modal	2023	1	7.140.000
160	P.C Unit	ASUS	Belanja Modal	2018	3	23.250.000
161	P.C Unit	Lenovo	Belanja Modal	2017	2	15.632.000
162	P.C Unit	Lenovo	Belanja Modal	2017	1	7.900.000
163	P.C Unit	PC DEsktop Acer Aspire TC708	Belanja Modal	2019	8	63.973.500
164	P.C Unit	HP Pavilion 20-a210 AOL PC	Blockgrant	2015	1	8.933.980
165	P.C Unit	HP Pavillon 20-a210L AOI PC	Blockgrant	2015	1	8.933.980
166	P.C Unit	AXIOO MYPC ONE PRO	Belanja Modal	2023	2	18.000.000
167	P.C Unit	Lenovo C440	Belanja Modal	2014	1	10.945.000
168	P.C Unit	Advan	Belanja Modal	2024	2	23.600.000
169	P.C Unit	lenovo	Belanja Modal	2015	1	12.499.993
170	P.C Unit	ACER C22-1650	Pusat	2021	1	12.540.000
171	P.C Unit	Samsung, S24R350FZEXX D	Belanja Modal	2022	2	28.398.000
172	P.C Unit	AXIOO	Belanja Modal	2023	2	28.600.000
173	P.C Unit	Lenovo	Belanja Non Modal	2013	2	29.014.772
174	P.C Unit	IBM/Acer	Belanja Modal	2013	1	29.876.000
175	Lap Top	HP Sleek Book	Belanja Modal	2013	1	4.906.000
176	Lap Top	HP. G 42 - 372 TU (Core 13, IGB, 320 GB, DVDRW, 14"1, WXGA, Wifi)	Belanja Modal	2011	1	5.500.000
177	Lap Top	ASUS	Belanja Modal	2019	5	39.927.800
178	Lap Top	COMPAQ presario B 1200	Belanja Modal	2008	1	11.950.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
179	Lap Top	ACER	Belanja Modal	2023	1	12.000.000
180	Lap Top	ACER	Belanja Modal	2007	1	12.300.000
181	Lap Top	Macbook Pro 13 inch	Belanja Modal	2020	1	24.200.000
182	Note Book	Lenovo	Belanja Modal	2017	3	18.891.000
183	Note Book	Dell Inspiron I5 3000 Series	Belanja Modal	2017	2	12.600.000
184	Note Book	HP 14 i3 VGA	Belanja Modal	2018	2	13.537.520
185	Tablet PC	IPAD PRO 11 Inch	Belanja Modal	2020	1	17.490.000
186	Printer		Belanja Modal	2021	1	3.300.000
187	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Intel	Belanja Modal	2021	4	16.698.000
188	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Dell Inspiron 3670	Belanja Modal	2018	1	5.515.000
189	Monitor	LG	Belanja Modal	2022	2	5.000.000
190	Monitor	Dell	Belanja Modal	2018	2	5.014.000
191	Monitor	17 MB15T	Belanja Modal	2019	2	5.969.800
192	Monitor	Samsung Smart TV UHD	Belanja Modal	2018	1	8.022.000
193	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon IP 2770	Belanja Modal	2013	1	660.000
194	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon IP 2770	Belanja Modal	2013	1	665.500
195	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser jet 1006	Belanja Modal	2008	1	1.223.000
196	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hp Laser jet P1102	Belanja Modal	2011	1	1.507.998
197	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LX 350+11+USB	Belanja Modal	2008	1	1.518.000
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP desjet Ultra ink Advantage 2520hc All in one	Belanja Modal	2014	1	1.616.750
199	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet 3050	Belanja Modal	2007	1	2.000.000
200	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LX-310 CC224341	Belanja Modal	2017	1	2.500.000
201	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA G3010	Pusat	2021	1	2.600.400
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet M1536DNF	Blockgrant	2015	1	3.064.930

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
203	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Office Jet Pro 8710	Belanja Modal	2018	2	6.729.400
204	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	Belanja Modal	2023	2	6.800.000
205	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro MFP 130fw	Belanja Modal	2018	1	3.510.000
206	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Eco Tank L3150	Belanja Modal	2019	5	19.826.400
207	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L6190	Belanja Modal	2020	2	11.440.000
208	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson, L6290	Belanja Modal	2022	1	7.000.000
209	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP Scanjet 5590	Belanja Modal	2016	1	7.150.000
210	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson Workforce DS-530 A4 Duplex Sheet-Fed Document Scanner	Belanja Modal	2019	1	9.902.800
211	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson Workforce DS-530	Belanja Modal	2021	1	10.500.000
212	External/ Portable Hardisk		Belanja Modal	2023	1	1.200.000
213	Server		Belanja Modal	2018	1	130.003.000
214	Hub	D link Des-10084	Blockgrant	2015	1	117.920
215	Hub		Belanja Modal	2017	1	195.000
216	Hub		Belanja Modal	2017	1	419.000
217	Hub		Belanja Modal	2017	1	29.674.700
218	Modem	WAVECOM	Belanja Modal	2018	1	497.000
219	Modem	ADVAN CPE ROUTER STAR	Pusat	2021	1	1.728.100
220	Acces Point	D-Link	Belanja Modal	2021	1	555.500
221	Alat Permainan Anak		Belanja Modal	2019	1	55.637.000
222	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Belanja Modal	2016	1	4.983.287.950
223	Bangunan Gedung Kantor Darurat		Belanja Modal	2017	1	65.459.000
224	Kanopi		Belanja Modal	2019	1	55.881.900
225	Taman Permanen		Belanja Modal	2018	1	196.081.900

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
226	Taman Permanen		Belanja Modal	2017	1	212.554.000
227	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil		uncategorized	2007	1	200.000
228	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	12.000
229	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	2	30.000
230	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	19.000
231	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	20.000
232	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	26.000
233	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	29.500
234	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	33.000
235	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	35.000
236	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	2	80.000
237	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	44.800
238	Buku-buku Pedoman		uncategorized	2008	1	45.000
239	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	2	90.000
240	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	48.800
241	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	54.000
242	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	59.000
243	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	60.000
244	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2008	1	65.000
245	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	68.000
246	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	69.500
247	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	73.000
248	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	90.000
249	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2008	1	110.000
250	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	118.000
251	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	127.900
252	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2016	1	128.000
253	Buku-buku Pedoman		Belanja Modal	2008	1	140.000
254	Buku Peraturan Perundang-undangan		uncategorized	2008	1	15.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
255	Buku Peraturan Perundang-undangan		uncategorized	2008	1	25.000
256	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2016	1	35.000
257	Buku Peraturan Perundang-undangan		uncategorized	2008	1	39.000
258	Buku Peraturan Perundang-undangan		uncategorized	2008	1	44.500
259	Buku Peraturan Perundang-undangan		uncategorized	2008	1	45.000
260	Buku Peraturan Perundang-undangan		uncategorized	2008	1	45.500
261	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2016	1	49.500
262	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2016	1	59.000
263	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2008	1	60.000
264	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2016	1	61.000
265	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2016	1	63.300
266	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2016	1	75.000
267	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2008	1	125.000
268	Buku Peraturan Perundang-undangan		Belanja Modal	2017	2	500.000
269	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		Belanja Modal	2020	1	191.059.000
270	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		Belanja Modal	2021	1	293.910.615
271	Software.....		Belanja Modal	2013	1	9.900.000
272	Software.....		Belanja Modal	2018	1	50.503.000
273	Software.....		Belanja Modal	2022	1	54.234.600
274	Software.....		Belanja Modal	2018	1	275.341.600
275	Kajian		Belanja Modal	2020	1	5.665.000
276	Kajian		Belanja Modal	2018	1	25.400.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
277	Kajian		Belanja Modal	2013	1	25.645.000
278	Kajian		Belanja Modal	2012	1	40.250.000
279	Kajian		Belanja Modal	2019	1	46.579.000
280	Kajian		Belanja Modal	2016	1	47.437.500
281	Kajian		Belanja Modal	2016	1	48.818.000
282	Kajian		Belanja Modal	2018	1	49.407.500
283	Kajian		Belanja Modal	2014	1	49.637.000
284	Kajian		Belanja Modal	2012	1	50.200.000
285	Kajian		Belanja Modal	2024	1	69.800.130
286	Kajian		Belanja Modal	2022	1	74.980.500
287	Kajian		Belanja Modal	2023	1	79.573.125
288	Kajian		Belanja Modal	2013	1	105.930.000
289	Kajian		Belanja Modal	2017	1	198.762.000
290	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	--	Belanja Modal	2007	1	500.000
291	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	--	Belanja Modal	2007	2	1.837.500
292	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	HP desjet Ultra ink Advantage 2520hc All in one	Belanja Modal	2014	1	1.616.750
293	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lenovo	Belanja Non Modal	2013	1	14.507.386
294	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat		uncategorized	2007	1	10.000.000
295	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	--	Belanja Modal	2007	1	400.000
296	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah		uncategorized	2008	2	1.000.000
297	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	TP-UNK	Belanja Modal	2015	1	500.000

SPESIFIKASI BARANG			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	JUMLAH	
No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek / Type			Jumlah Barang	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
298	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	--	Belanja Modal	2007	1	918.750
299	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	--	Belanja Modal	2007	5	16.500.000
300	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	Lexmark	Belanja Non Modal	2013	3	11.992.200
301	Aset Lain-Lain Lainnya Peralatan dan Mesin	--	Belanja Modal	2014	1	1.491.000
302	Aset Lain-Lain Lainnya Peralatan dan Mesin	P/N/ MOOX SIR	Belanja Modal	2007	1	7.300.000
Total					833	10.899.709.691

Sumber : Data Aset Sub Bagian Umum DPMPTSP Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis Periode sebelumnya. Sasaran tersebut yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Perangkat Daerah

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perizinan Non Berusaha serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Sedangkan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi kegiatan berusaha di Kabupaten Gunungkidul tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dokumen Rencana Strategis periode sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		90	91	92	93	94	91,84	98,28	98,33	100,03	N/A	102,04	108	106,88	107,56	N/A
2.	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha		Pertumbuhan Nilai Investasi Nasional dan Lokal		31,05	31,10	31,16	31,22	31,27	33,27	68,07	32,36	31,23	N/A	107,15	218,87	103,85	100,03	N/A
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Program dalam Renja terhadap RKPD dan Program dalam Renstra terhadap RPJMD		80,35	80,46	80,55	80,65	80,75	84,25	82,10	82,55	82,55	N/A	104,85	104,71	102,48	102,35	N/A

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode Renstra sebelumnya dapat dilihat dari tabel 2.3 diatas. Dari data hasil capaian tersebut dapat dilihat bahwa secara umum pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang memuaskan dengan selalu tercapai atau melampauinya target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah selalu melampaui target serta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik sebagai poros baru proses perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Eksistensi Mal Pelayanan Publik dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi kenyamanan, ketepatan waktu maupun aksesibilitasnya. Selain itu, kemudahan implementasi perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) serta inovasi aplikasi perizinan berbasis online melalui SIMPEL (Sistem Pelayanan Online) merupakan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pada sasaran ini. Kedepan, memaksimalkan peran Mal Pelayanan Publik dengan memperhatikan alokasi anggaran guna meningkatkan pengembangan sarana prasarana penunjang menjadi hal yang patut menjadi prioritas.

Pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian yang selalu melampaui target setiap tahunnya. Meskipun selalu melampaui target, namun capaian kinerjanya mengalami fluktuasi selama periode Renstra tahun 2021-2026. Capaian tertinggi selama periode Renstra tersebut dapat dilihat terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,07% atau tercapai 218,87% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari kondisi pemulihan pasca pandemi covid-19 yang melumpuhkan hampir semua sektor, tidak terkecuali investasi. Setelah naik tajam ditahun 2022, kecenderungan realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul kembali melandai seperti sebelum masa pemulihan pandemi. Keberhasilan pencapaian target pada sasaran ini tidak terlepas dari inovasi program kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Gunungkidul. Kedepan, pemberian insentif serta kemudahan penanaman modal bagi investor serta inovasi promosi penanaman modal berbasis digital menjadi tantangan yang harus lebih diperhatikan.

Pencapaian kinerja pada sasaran yang terakhir, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah juga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian kinerja yang selalu melampaui target setiap tahun. Akan tetapi, apabila dibandingkan dari tahun ke tahun selama periode Renstra, capaian kinerja juga mengalami fluktuasi. Capaian kinerja yang sudah meningkat relatif tinggi diawal periode Renstra, kembali menurun dan cenderung naik dengan angka yang konstan ditahun berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari dinamika kepegawaian yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kekosongan pada beberapa jabatan strategis baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap optimalisasi kerja serta beban kerja pegawai. Salah satu hal yang patut mendapatkan apresiasi ditengah dinamika kepegawaian yang terjadi adalah masih tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Kerjasama, koordinasi serta etos kerja yang baik dari seluruh lapisan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja. Selain itu, koordinasi yang baik dari seluruh elemen mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam pencapaian target. Kedepan, meningkatkan komitmen dan kerjasama serta memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki merupakan hal yang wajib dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Apabila dilihat dari sisi alokasi anggaran terkait pencapaian sasaran dan realisasinya, tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	460.209.500	460.209.500	525.000.000	525.000.000	525.000.000	173.105.000	478.188.500	374.937.880	265.566.500	N/A	37,61	103,91	71,42	50,58	N/A	16.197.625	30.820.500
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	576.972.000	576.972.000	618.424.500	628.424.500	668.424.500	287.960.276	627.340.600	656.483.225	803.459.713	N/A	49,91	108,73	106,15	127,85	N/A	22.863.125	171.833.146
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.978.344.589	3.978.344.589	4.422.927.089	4.451.891.550	4.532.997.871	3.994.854.431	3.530.295.764	2.294.165.148	2.265.276.928	N/A	100,41	88,73	51,87	50,88	N/A	138.663.321	- 576.525.834

Dari data yang disajikan dalam tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa rasio capaian kinerja pada sasaran prioritas dibandingkan dengan target anggaran pada Renstra memiliki kecenderungan fluktuatif. Rasio capaian kinerja paling rendah terjadi pada tahun 2021 dimana terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada refocussing anggaran dan dialokasikan ke sektor prioritas penanggulangan pandemi. Oleh sebab itu, pelaksanaan program kegiatan untuk tahun 2021 menjadi terbatas dan kurang optimal. Tahun 2022 dimana masuk ke fase pemulihan atas kondisi pandemi covid-19 yang berangsur membaik, alokasi anggaran program prioritas mengalami peningkatan kembali. Meskipun ditahun-tahun selanjutnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Dana Alokasi Umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh kemampuan pendanaan daerah serta urgensi pendanaan prioritas dari Pemerintah Daerah.

Sumber pembiayaan program kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Fasilitas Penanaman Modal yang dialokasikan untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Untuk tahun 2025, alokasi pembiayaan dari DAK-NF Fasilitas Penanaman Modal telah dihapus oleh Pemerintah Pusat sebagai dampak dari penyesuaian dinamika kebijakan prioritas pembangunan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sehingga untuk tahun 2025 sumber pembiayaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya berasal dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Gunungkidul.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok sasaran penerima layanan dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah Masyarakat Gunungkidul, calon investor, maupun pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan usaha ataupun non berusaha. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki kewenangan dalam perizinan kegiatan non berusaha di Kabupaten Gunungkidul. Selain pengurusan perizinan berusaha melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS) – Risk Based Approach (RBA)*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengembangkan Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) untuk memfasilitasi pengurusan perizinan non berusaha via online. Selain fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bisa diakses oleh pengguna layanan, system yang dikembangkan berbasis online juga dapat diakses oleh pengguna layanan dimanapun berada.

2.1.5 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha guna memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan/atau pelayanan umum kepada masyarakat. BUMD merupakan salah satu instrumen Pemerintah Daerah guna mendorong pembangunan serta kemandirian daerah melalui kegiatan usaha yang dikelola secara profesional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal, sinergi antara BUMD dan Perangkat Daerah menjadi kunci strategis. Kolaborasi yang erat dan berkelanjutan antara kedua entitas ini merupakan bentuk nyata integrasi kekuatan sumber daya daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai institusi bisnis milik pemerintah daerah, BUMD memiliki peran penting yang tidak hanya sebagai penggerak perekonomian lokal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dukungan sarana dan prasarana dari salah satu BUMD Kabupaten Gunungkidul yaitu PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG) Perseroda terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi bukti sinergitas serta kolaborasi yang nyata dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Sinergi ini harus dibangun atas dasar perencanaan terpadu, transparansi, serta akuntabilitas. Partisipasi aktif PT Bank Daerah Gunungkidul (BDG) Perseroda dalam berbagai forum dan diskusi memberikan sumbang saran, ide, gagasan serta dukungan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan bersama, menjadi daya dukung positif atas kinerja dan manfaat kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kolaborasi yang kuat antara BUMD dan Perangkat Daerah bukan hanya akan mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas, memperkuat kemandirian daerah, serta meningkatkan daya saing lokal. Melalui semangat gotong royong dan profesionalisme, sinergi antara BUMD dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun-tahun mendatang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi sebagai upaya akselerasi proses pembangunan daerah. Strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi promosi, pengembangan potensi daerah serta fasilitasi kerjasama dan pengembangan investasi dapat menjadi stimulan pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian kinerja pelayanan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan mampu menguatkan akses para calon investor, sehingga lebih tepat sasaran yang mampu mengarahkan langsung kepada para pemilik sumber daya modal untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tentu banyak permasalahan yang dihadapi sebagai bagian dari sebuah tantangan yang perlu dicarikan alternatif solusinya. Identifikasi peta permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih relatif rendahnya realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul dari sisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala	Masih relatif rendahnya pemahaman mengenai kewajiban penyampaian LKPM serta pemanfaatan OSS
		Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala	Kurangnya intensitas pendampingan maupun bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM
		Minat investor dengan skala menengah dan besar untuk berinvestasi di Gunungkidul masih relatif rendah	Kajian IPRO (Investment Project Ready to Offer) belum termanfaatkan dengan optimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Belum optimalnya infrastruktur pendukung investasi serta sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan	Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan masih kurang	Dukungan alokasi anggaran belanja pemenuhan sarana dan prasarana yang terbatas
3.	Perubahan regulasi yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan perizinan dan non perizinan	Kualitas dan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat berdampak pada pelaksanaan Program kegiatan ditingkat Daerah
4.	Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) belum dapat termanfaatkan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul	Belum optimalnya promosi investasi melalui penawaran IPRO baik dalam bentuk pameran, event, ataupun secara digital	Dukungan alokasi anggaran untuk promosi potensi investasi terbatas
5.	Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul masih perlu ditingkatkan	Pengembangan sarana prasarana penunjang pelayanan Mal Pelayanan Publik masih relatif kurang	Dukungan alokasi anggaran yang terbatas serta keterbatasan kewenangan dalam pemanfaatan perjanjian pinjam pakai area Lantai II terminal Dhaksinarga Wonosari dengan Kementerian Perhubungan RI

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat membuka diri dengan berbagai peluang investasi baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu berimplikasi terhadap geliat roda pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul. Memiliki keunggulan komparatif berupa keanekaragaman Sumber Daya Alam, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian, investasi dengan skala menengah dan besar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif rendah dengan potensi besar yang dimiliki.

Secara ringkas, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan Sarana Prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. Keterbatasan komposisi jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentu akan menjadi sebuah tantangan ditengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. Adanya inovasi proses perizinan berbasis elektronik melalui aplikasi OSS semakin memudahkan akses terhadap layanan perizinan dimanapun berada. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau masih kesulitan dalam memanfaatkan sistem tersebut;
- d. Lokasi strategis investasi yang menjadi daya tarik bagi calon investor, khususnya pada sektor pariwisata banyak yang masuk kedalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam regulasinya, pemanfaatan KBAK tidak diperkenankan untuk mengubah Bentang Alam Karst serta seluruh kegiatan usaha yang ada didalamnya wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang biasanya menelan biaya cukup besar. Hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyusun Kajian Peta Potensi Investasi yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan detail lokasi serta alternatif pemanfaatannya.
- e. Masih relatif rendahnya pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul yang memahami dan melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM melalui sistem OSS. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul adalah memberikan bimbingan teknis serta sosialisasi terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala per triwulan dan semesteran.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menghadapi beberapa tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan inovasi pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik.
- b. Pemberian fasilitasi berupa beasiswa atau helpdesk baik secara online maupun offline untuk memberikan bantuan atau pendampingan kepada pelaku usaha yang masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS.
- c. Menyusun strategi promosi penanaman modal daerah dengan pendekatan digital, sebagai bagian dari inovasi promosi potensi investasi Kabupaten Gunungkidul yang dapat dikembangkan.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk dokumen RTRW Kabupaten Gunungkidul sudah ditetapkan namun masih dalam tahap review untuk dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam menerbitkan sebuah produk perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/Instansi Teknis.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terutama permohonan izin yang berkaitan dengan adanya limbah usaha karena pengelolaan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam. Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator-indikator capaian dalam *Sustainable Development Goal's (SDG's)*.

Kajian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah diperlukan untuk mengetahui kondisi capaian SDG's pada suatu daerah yang menjadi dasar penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan untuk menyusun target dan kebijakan pembangunan selanjutnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa proses analisis kajian lingkungan hidup harus memastikan bahwa pembangunan daerah telah memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya.

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang perlunya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Hasil tinjauan dari implikasi RTRW secara umum di Kabupaten Gunungkidul, permasalahan tata ruang masih menjadi kendala berkenaan dengan investasi sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sedang direview dan baru tersedia satu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Demikian pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi pada pengawasan penanaman modal nantinya serta keberadaan sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai Kawasan Bentang Alam Karst.

Isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Isu Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Investasi sektor Pariwisata, Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Belum optimalnya pengembangan iklim investasi di Kabupaten Gunungkidul	Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian dan Peningkatan Kesempatan Berusaha	Peranan Emerging Economies dengan adanya Investasi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta reformasi struktural dan Iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing	Pengembangan Infrastruktur Hijau	Ketimpangan Penyebaran Investasi	Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan kegiatan usahanya
	Masih relatif rendahnya realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		Persaingan Sumber Daya Alam	Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Investasi Infrastruktur	Meningkatkan kualitas, peran, dan kinerja pelayanan pada Mal Pelayanan Publik

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung investasi serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan		Perubahan Iklim dan investasi berkelanjutan	Perkembangan Teknologi Informasi	Pengelola Sumber Daya Alam	Lokasi strategis yang menjadi prioritas daya tarik investor berada pada Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan wilayah lindung.
	Pengaruh perubahan regulasi yang dinamis dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha		Perubahan Geopolitik global		Perkembangan Teknologi Informasi	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi untuk meningkatkan promosi investasidan pelayanan penanaman modal
	Informasi potensi investasi dan sektor-sektor usaha prioritas yang siap ditawarkan kepada investor (Investment Project Ready to Offer) belum lengkap dan belum termanfaatkan dengan baik untuk menarik minat investor				Persaingan ketat dalam menarik minat investor	

Secara ringkas permasalahan utama atau isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul secara kelembagaan sudah sesuai dengan nomenklatur. Kekosongan pada jabatan fungsional sudah mulai terisi ditahun 2024 dan akan dilanjutkan proses pengisiannya diawal tahun 2025 melalui proses *inpassing*. Adanya permasalahan terkait kekosongan pada beberapa jabatan serta terdapat beberapa pegawai yang mulai memasuki masa purna tugas menyebabkan semakin sedikitnya komposisi jumlah pegawai yang dimiliki sehingga menambah beban kerja dalam melaksanakan program kegiatan.
- b. Dilihat dari aspek perizinan, dengan diberlakukannya proses perizinan online melalui sistem Online Single Submission (OSS) dimana pemohon dapat mengakses layanan perizinan secara mandiri dari manapun berada merupakan sebuah inovasi yang semakin baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang belum menguasai teknologi sehingga masih kesulitan untuk mengakses sistem OSS secara mandiri. Hal tersebut telah dijembatani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka layanan bebantuan di Mal Pelayanan Publik dan juga melalui kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis di lapangan.
- c. Apabila melihat dari aspek pelaporan, kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait kewajiban penyampaian LKPM maupun tata cara penyampaian LKPM secara berkala.
- d. Banyaknya frekuensi kegiatan evaluasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kementerian maupun Lembaga terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sering menggunakan indikator penilaian yang relatif sama. Pada tahun 2024, ada empat penilaian atau evaluasi yaitu Evaluasi Pelayanan Publik, Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Evaluasi Mal Pelayanan Publik serta Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Hal tersebut tentunya akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran mengingat jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas.
- e. Dilihat dari sektor investasi, sektor pariwisata memang telah menjadi unggulan Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang dihadapi terkait hal tersebut salah satunya terkait lokasi strategis yang menjadi primadona serta daya tarik bagi calon investor masuk kedalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan wilayah lindung. Dalam peraturannya, dilarang untuk melakukan perubahan bentang alam karst serta seluruh kegiatan/usaha yang ada dalam KBAK wajib untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, adanya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/02.01/XII/ 2021 tentang penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kawasan yang banyak diminati oleh calon investor adalah wilayah yang mayoritas masuk dalam wilayah LSD, dimana untuk kawasan LSD ini sulit untuk beralih fungsi (harus ada rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

- f. Selanjutnya, keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu isu strategis setiap tahunnya. Alokasi anggaran baik untuk mengoptimalkan kegiatan promosi investasi, menunjang pengoptimalan iklim investasi, pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan maupun pengembangan fasilitas Mal Pelayanan Publik masih sangat terbatas jumlahnya. Keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul belum dapat dikembangkan secara optimal, selain keterbatasan alokasi dalam penganggaran juga keterbatasan kewenangan dalam perjanjian pinjam pakai area Lantai 2 Gedung Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

Tujuan menggambarkan sebuah kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan, merefleksikan konteks pembangunan serta tantangan yang dihadapi, dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian Visi Misi Daerah. Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

” Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif ”

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja dari tujuan tersebut. Target kinerja memuat kondisi awal serta kondisi akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator merupakan suatu pengamatan atau ukuran yang diasumsikan sebagai bukti atribut atau sifat suatu fenomena. Indikator dipantau dari waktu ke waktu dan digunakan untuk menilai kemajuan menuju pencapaian hasil dan objektif yang diinginkan. Indikator terdiri dari informasi yang menandakan adanya perubahan. Indikator merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif yang memberikan cara sederhana serta andal untuk mencerminkan perubahan yang terkait dengan suatu intervensi.

Indikator digunakan dalam menetapkan baseline, pemantauan dan evaluasi. Informasi dikumpulkan pada baseline untuk menetapkan target indikator yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kemajuan terhadap hasil pemantauan. Perumusan tujuan, indikator serta target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tersaji dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja Tujuan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	31,23 %	0,70 %	0,80 %	0,90 %	1,00 %	1,10 %	1,20 %

3.2 Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah, dijabarkan Sasaran Perangkat Daerah yang secara relevan akan mendukung pencapaian Tujuan Perangkat Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Sasaran Perangkat Daerah yang dirumuskan merupakan manifestasi hasil pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang diformulasikan secara terukur, rasional dan dapat dilaksanakan serta dipertanggung jawabkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selaras dengan upaya pencapaian tujuan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, dirumuskan sasaran untuk periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah
2. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul

Pencapaian indikator kinerja program maupun kegiatan yang telah ditetapkan juga menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Secara terperinci hubungan antara tujuan, sasaran, beserta target kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

NO	NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	0,80 %	0,90 %	1,00 %	1,10 %	1,20 %
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	85,03	85,08	85,13	85,18	85,23
			Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunung kidul	838.084.626.109	845.627.387.744	854.083.661.621	863.478.581.899	873.840.324.882

3.3 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi dari sebuah aktivitas atau kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dan memiliki cara untuk mencapai tujuan secara efektif. Dengan kata lain, strategi dapat diartikan sebagai seni untuk memanfaatkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki guna mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap paling efektif dan efisien untuk dapat mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Strategi dan Kebijakan jangka Menengah menggambarkan bagaimana cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan, sasaran, serta target kinerja jangka menengah pada program kegiatan prioritas yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Strategi dan Kebijakan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perumusan program kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan dari perumusan strategi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas
- b. Memvalidasi tujuan organisasi
- c. Mengelola peluang dan ancaman
- d. Memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan organisasi

Adapun perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : - Koordinasi intensif dengan dinas instansi terkait - Tuntutan masyarakat dan penanam modal terhadap peningkatan kualitas pelayanan	Tantangan : - Masyarakat kurang paham terhadap pentingnya perizinan dan non perizinan - Meningkatnya investor untuk berinvestasi
Kekuatan : - Regulasi pemerintah pusat yang mendukung investasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021) - Investasi sebagai program unggulan - Regulasi tentang Penanaman modal (RUPM, Perda Penanaman Modal)	Alternatif Strategi : - Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal - Meningkatkan kualitas pelayanan implementasi OSS - Meningkatkan kemitraan dengan penanaman modal	Alternatif Strategi : - Meningkatkan daya tarik penanaman modal/ promosi - Meningkatkan kualitas kelembagaan penanaman modal - Sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
Kelemahan : - Pelaksanaan regulasi penanaman modal belum optimal - Kualitas dan kuantitas SDM kurang - Sarana dan prasarana belum memadai - Pelaksanaan PTSP belum optimal	Alternatif Strategi : - Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan dinas instansi terkait - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM DPMPTSP	Alternatif Strategi : - Meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana - Meningkatkan kualitas kelembagaan penanaman modal dan PTSP

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selanjutnya akan diuraikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Optimalisasi peran Mal Palayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Peningkatan daya tarik potensi investasi Kabupaten Gunungkidul
			Peningkatan efektivitas Fasilitasi dan Bimbingan Teknis penyampaian Laporan LKPM

3.4 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan serangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dicapai pada sebuah organisasi. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan harus memperhatikan relevansi serta konsistensi antara tujuan, sasaran, dan strategi. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun wujud atau operasionalisasi dari strategi yang dirumuskan akan dimunculkan dalam bentuk program Perangkat Daerah, sedangkan arah kebijakannya dirumuskan melalui penentuan/penetapan kegiatan. Selanjutnya, rumusan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI : Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	84,98	85,03	85,08	85,13	85,18	85,23	
MISI : Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan Oleh Petani dan Nelayan, Serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil Menengah yang Inklusif dan Kreatif.		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	831.433.160.822	838.084.626.109	845.627.387.744	854.083.661.621	863.478.581.899	873.840.324.882	

Strategi maupun arah kebijakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlandaskan pada paradigma pembangunan Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada filosofi "Dhaksinarga Bhumikarta". Dhaksinarga berasal dari kata *Dhaksina* yang berarti Selatan, serta kata *Arga* yang berarti Gunung, yang kemudian dirangkai menjadi satu kata yaitu Dhaksinarga yang memiliki arti Gunungkidul. Sedangkan Bhumikarta berasal dari kata *Bhumi* yang bermakna Bumi, Tanah atau Daerah serta kata *Karta* yang memiliki makna Subur, Makmur, Rahayu, Damai dan Sejahtera.

Dengan demikian, paradigma pembangunan Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada filosofi Dhaksinarga Bhumikarta yang dapat diartikan sebagai tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan suatu semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan disegala bidang berlandaskan *Hasta Dharma*. Adapun *Hasta Dharma* merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur daerah Kabupaten Gunungkidul, meliputi :

- a. Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama;
- b. Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum;
- c. Penyuluh didalam gelap dan penolong didalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir batin;
- d. Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif dan korektif;
- e. Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju kearah kesejahteraan masyarakat;
- f. Bersifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana agar dapat menampung dan mencari penjelasan segala persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari;
- g. Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa; dan
- h. Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan didalam kebaikan lahir dan batin bagi masyarakat.

Paradigma pembangunan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu "Hamemayu Hayuning Bawana". Secara harafiah Hamemayu Hayuning Bawana memiliki arti membuat dunia lebih indah atau ayu. Dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya membangun daerah dengan ramah lingkungan. Pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gunungkidul hendaknya dilandasi dengan paradigma pembangunan secara berkelanjutan atau *sustainable development*. Dengan tetap menyelaraskan filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul serta Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus memperhatikan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 :

" Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban "

Visi jangka menengah tersebut menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam periode tahun 2025-2029.

Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2025-2029 diharapkan akan mendukung pencapaian tujuan akhir membangun masyarakat Gunungkidul yang Adil Makmur, memperhatikan keseimbangan serta kelestarian lingkungan dengan tetap mengedepankan adab dan adat istiadat yang mengakar kuat pada masyarakat Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif. Pencapaian Misi tersebut ditunjang dengan Tujuan Daerah yaitu Terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan Indikator Tujuan Daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

Tujuan Daerah beserta Indikator Tujuan Daerah tersebut dijabarkan kedalam Sasaran Daerah, yaitu Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing yang diukur dengan Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB). Strategi Kebijakan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dari sisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Meningkatkan Arah dan Fokus Pembangunan Investasi di Daerah. Arah Kebijakan yang diamanatkan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tersebut adalah Meningkatkan Kemudahan dan Pengembangan Iklim Investasi di Daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 terdapat 7 (tujuh) program strategis yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai upaya untuk mewujudkan pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan. Program strategis tersebut ialah :

1. Program Bocah Pinter : Meningkatkan derajat pendidikan warga melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata melalui penguatan pendidikan budi pekerti, bantuan biaya pendidikan, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru.
2. Program Warga Sehat : Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan untuk rakyat melalui pencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi, perbaikan layanan puskesmas dan RSUD, dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

3. Tani Makmur & UMKM Berdaya : Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian,peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat melalui penyediaan dan perluasan akses pupuk, bibit, perbaikan infrastruktur penunjang (irigasi dan jalan usaha tani), digitalisasi UMKM dengan bela-beli produk UMKM, perluasan akses kredit mikro, dan pemajuan desa wisata.
4. Gunungkidul Berdikari : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung infrastruktur berkualitas melalui perbaikan jalan, penerangan jalan, perluasan jaringan air bersih dan telekomunikasi, pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan peningkatan pendapatan daerah, serta memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.
5. Pamong Nglayani dan Ngayomi : Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.
6. Warga Gayeng dan Guyub : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur melalui perlindungan sosial yang inklusif, peningkatan jaminan sosial untuk kelompok rentan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya, serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga.
7. Alam Lestari : Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program prioritas daerah ke-3 dan juga sekaligus ke-4 yaitu Tani Makmur & UMKM Berdaya : Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian,peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat melalui penyediaan dan perluasan akses pupuk, bibit, perbaikan infrastruktur penunjang (irigasi dan jalan usaha tani), digitalisasi UMKM dengan bela-beli produk UMKM, perluasan akses kredit mikro, dan pemajuan desa wisata serta Gunungkidul Berdikari : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung infrastruktur berkualitas melalui perbaikan jalan, penerangan jalan, perluasan jaringan air bersih dan telekomunikasi, pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan peningkatan pendapatan daerah, serta memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan program prioritas daerah tersebut, maka disusunlah rencana program prioritas beserta alokasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pembangunan Nasional akan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

RPJMN memuat strategi pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kementerian/Lembaga dan Lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMN akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif dan berkelanjutan.

Visi RPJMN selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, serta untuk meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap PDB nasional.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu pada seluruh siklus hidup secara inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Hilirisasi dan industrialisasi menjadi upaya dalam memaksimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui integrasi ekonomi domestik dan global.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Dalam mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka perlu memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa. Bersamaan dengan pembangunan perdesaan, untuk menjaga satu sistem fungsi kewilayahan yang utuh, pembangunan perkotaan juga dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan desa-kota.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggungjawab serta untuk mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selain itu, dibutuhkan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung kemajuan bangsa.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penguatan toleransi antarumat beragama dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan mempertimbangkan mitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana, serta pelestarian nilai dan warisan budaya untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Secara garis besar, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung serta melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Asta Cita ke-5 yaitu Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dalam proses penyusunan dokumen Perencanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), harus menerjemahkan Visi, Misi serta Asta Cita yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Demikian pula *breakdown* sampai dengan level Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang penanaman modal senantiasa harus memperhatikan dan menjadikan pedoman kebijakan yang disusun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Kebijakan BKPM Republik Indonesia hingga tahun 2024 adalah mengejar nilai realisasi investasi dengan titik beratnya pada investasi yang berkualitas. Diharapkan investasi yang masuk tidak hanya dalam jumlah besar akan tetapi investasi haruslah menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal serta memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian.

Tabel 3.6
Pentahapan Pembangunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi pembangunan agar Terwujud melalui Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Percepatan pondasi pembangunan agar Terwujud melalui Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Peningkatan pondasi pembangunan agar Terwujud Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Optimalisasi pondasi pembangunan agar Terwujud Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Pemantapan pondasi pembangunan agar Terwujud Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Pada dasarnya Program adalah Kumpulan dari kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maupun interpretasi dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, maka perlu dirumuskan program pendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, agar tercipta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, terukur dan akuntabel. Rencana program dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Program Prioritas, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - c. Program Promosi Penanaman Modal;
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
 - h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Secara terperinci, rumusan program pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.861.035.665		4.019.724.230,83		4.064.512.244,55		4.180.536.366,28		4.198.104.078,55	DPMPTSP	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,57	82,61	2.870.833.165	82,62	3.096.387.280,83	82,63	3.148.992.244,55	82,64	3.237.766.366,28	82,65	3.246.084.078,55	DPMPTSP	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berinvestasi	52	62	118.475.000	67	160.000.000	72	125.500.000	77	126.000.000	82	126.500.000	DPMPTSP	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	3	6	137.156.000	7	110.000.000	8	120.000.000	9	130.000.000	10	132.500.000	DPMPTSP	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan pada Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II	100	100	285.912.000	100	205.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	100	216.000.000	DPMPTSP	
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan pada Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II	100	100	48.757.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000	DPMPTSP	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	273.887.500	100	278.336.950	100	282.520.000	100	286.770.000	100	291.020.000	DPMPTSP	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	126.015.000	100	130.000.000	100	132.500.000	100	135.000.000	100	135.000.000	DPMPTSP	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				0		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	DPMPTSP	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Diplomasi Kerjasama Dalam Negeri yang Aktif	0	0	0	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	DPMPTSP	
SEKRETARIAT DAERAH				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	DPMPTSP	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik	0	0	0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	DPMPTSP	

4.2 Uraian Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul terpilih maupun interpretasi dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, maka perlu dirumuskan serangkaian kegiatan yang merupakan penjabaran dari setiap program yang telah ditetapkan, baik prioritas maupun penunjang sebagai pendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, agar tercipta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, terukur dan akuntabel. Rencana kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan dari Program Prioritas, meliputi :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- C. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- D. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
- H. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Peningkatan Budaya Pemerintahan

Secara terperinci, rumusan kegiatan sebagai penjabaran dari program prioritas dan penunjang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul			Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul (Rp)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan dan Penganggaran DPMPTSP yang Tersusun	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Dokumen Evaluasi Kinerja DPMPSTSP yang Tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Jumlah investor yang berinvestasi (Investor)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Dokumen Pengembangan Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Jumlah kepeminatan investasi (Investor)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Dokumen Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Pelaku Usaha yang terfasilitasi Perizinan dan Pelaporan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Penanaman Modal		Jumlah diplomasi kerjasama dalam negeri yang aktif (Kerja Sama)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Dokumen Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	2.22.08.5.07.0003 - Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	
				Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	2.22.08.5.07.0007 - Publikasi Seni dan Budaya Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan pada Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan pada Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Dokumen Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dokumen Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Database Perizinan yang dikelola dengan baik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			Peningkatan Kualitas Layanan Publik		Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Inovasi Layanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan terkait. Berdasarkan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul terpilih maupun interpretasi dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, maka perlu dirumuskan serangkaian sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari setiap kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai pendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, agar tercipta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, terukur dan akuntabel. Rencana sub kegiatan, indikator, target serta pagu indikatif dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul
Periode Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.861.035.665		4.019.724.230,83		4.064.512.244,55		4.180.536.366,28		4.198.104.078,55		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.870.833.165		3.096.387.280,83		3.148.992.244,55		3.237.766.366,28		3.246.084.078,55		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	82,57	82,61	2.870.833.165	82,62	3.096.387.280,83	82,63	3.148.992.244,55	82,64	3.237.766.366,28	82,65	3.246.084.078,55	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.032.000		57.100.000		61.350.000		65.600.000		66.900.000		
Dokumen Evaluasi Kinerja DPMPSTP yang Tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	780.000	4	750.000	4	1.000.000	4	1.250.000	4	1.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				780.000		750.000		1.000.000		1.250.000		1.500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	780.000	4	750.000	4	1.000.000	4	1.250.000	4	1.500.000		
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran DPMPTSP yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	53.252.000	3	56.350.000	3	60.350.000	3	64.350.000	3	65.400.000		
	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD (Dokumen)	2	2				2				2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17				17				17			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45.237.000		42.500.000		44.500.000		46.500.000		47.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	45.237.000	3	42.500.000	3	44.500.000	3	46.500.000	3	47.000.000		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)			1.330.000		1.850.000		2.350.000		2.850.000		2.900.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	1	1.330.000	1	1.850.000	1	2.350.000	1	2.850.000	1	2.900.000		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.070.000	1	1.250.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1	1	1.070.000	1	1.250.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	2.000.000		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.505.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	2	2	1.505.000	2	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.505.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD (Dokumen)	2	2	1.505.000	2	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.605.000		1.750.000		2.000.000		2.250.000		2.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	1.605.000	17	1.750.000	17	2.000.000	17	2.250.000	17	2.500.000		
2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	1	1	1.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)													
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.864.244.665		2.003.868.830,83		2.035.338.794,55		2.103.549.916,28		2.105.435.128,55		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	812	812	1.864.244.665	812	2.003.868.830,83	812	2.035.338.794,55	812	2.103.549.916,28	812	2.105.435.128,55		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil	13	13				13		13		13			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)													
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.826.759.665		1.965.368.830,83		1.994.838.794,55		2.061.549.916,28		2.062.935.128,55		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	812	812	1.826.759.665	812	1.965.368.830,83	812	1.994.838.794,55	812	2.061.549.916,28	812	2.062.935.128,55		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.180.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1	1	2.180.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				35.305.000		35.500.000		37.000.000		38.000.000		38.500.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	35.305.000	13	35.500.000	13	37.000.000	13	38.000.000	13	38.500.000		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.000.000		750.000		1.000.000		1.250.000		1.500.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	750.000	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000		750.000		1.000.000		1.250.000		1.500.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	750.000	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.500.000		
2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.150.000		1.500.000		1.800.000		2.100.000		2.400.000		
Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	1.150.000	12	1.500.000	12	1.800.000	12	2.100.000	12	2.400.000		
2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.150.000		1.500.000		1.800.000		2.100.000		2.400.000		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	1.150.000	12	1.500.000	12	1.800.000	12	2.100.000	12	2.400.000		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.561.700		66.500.000		67.500.000		68.500.000		68.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Nya (Paket)	1	1	64.561.700	1	66.500.000	1	67.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000					
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1				1				1					1	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1				1				1					1	
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				14.775.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000					
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Nya (Paket)	1	1	14.775.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000					
2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaawaian				45.786.700		42.000.000		43.000.000		44.000.000		44.000.000					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	45.786.700	1	42.000.000	1	43.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000		
2.18.01.2.05.0003 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				361.514.000		371.742.500		378.327.500		384.640.500		387.273.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	361.514.000	4	371.742.500	4	378.327.500	4	384.640.500	4	387.273.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	365	365		365		365		365		365			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.06.0001 - Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				7.530.000		8.000.000		8.250.000		8.500.000		8.750.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	7.530.000	4	8.000.000	4	8.250.000	4	8.500.000	4	8.750.000		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				229.887.000		232.000.000		234.500.000		236.000.000		236.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	2	229.887.000	2	232.000.000	2	234.500.000	2	236.000.000	2	236.500.000		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.638.000		17.700.000		18.000.000		18.250.000		18.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	2	16.638.000	2	17.700.000	2	18.000.000	2	18.250.000	2	18.500.000		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.080.000		3.600.000		4.800.000		6.000.000		7.200.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	365	365	1.080.000	365	3.600.000	365	4.800.000	365	6.000.000	365	7.200.000		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.750.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	3.750.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.104.000		104.692.500		106.277.500		108.640.500		108.823.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24	102.104.000	24	104.692.500	24	106.277.500	24	108.640.500	24	108.823.000		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				525.000		750.000		1.000.000		1.250.000		1.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	525.000	1	750.000	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.500.000		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				403.450.800		417.975.950		424.975.950		431.975.950		432.475.950		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	72	72	403.450.800	72	417.975.950	72	424.975.950	72	431.975.950	72	432.475.950		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	14	14				14		14					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				262.782.000		275.975.950		280.975.950		285.975.950		286.475.950		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	72	72	262.782.000	72	275.975.950	72	280.975.950	72	285.975.950	72	286.475.950		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				140.668.800		142.000.000		144.000.000		146.000.000		146.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	14	14	140.668.800	14	142.000.000	14	144.000.000	14	146.000.000	14	146.000.000		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.880.000		126.950.000		128.700.000		130.150.000		131.600.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	182	182	120.880.000	182	126.950.000	182	128.700.000	182	130.150.000	182	131.600.000				
	Jumlah Mebel yang terpelihara (Unit)	10	10				10				10					10
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	31	32				32				32					32
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1					1
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	20				20				20					20

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)													
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				87.700.000		90.000.000		90.500.000		91.000.000		91.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	182	182	87.700.000	182	90.000.000	182	90.500.000	182	91.000.000	182	91.500.000		
2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				600.000		1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara (Unit)	10	10	600.000	10	1.000.000	10	1.200.000	10	1.400.000	10	1.600.000		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.200.000		12.200.000		12.500.000		12.750.000		13.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	31	32	10.200.000	32	12.200.000	32	12.500.000	32	12.750.000	32	13.000.000		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.380.000		17.500.000		18.000.000		18.250.000		18.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1	16.380.000	1	17.500.000	1	18.000.000	1	18.250.000	1	18.500.000		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.250.000		6.500.000		6.750.000		7.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	20	20	6.000.000	20	6.250.000	20	6.500.000	20	6.750.000	20	7.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				118.475.000		160.000.000		125.500.000		126.000.000		126.500.000		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Investor)	52	62	118.475.000	67	160.000.000	72	125.500.000	77	126.000.000	82	126.500.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				118.475.000		160.000.000		125.500.000		126.000.000		126.500.000		
Dokumen Pengembangan Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	118.475.000	1	160.000.000	0	125.500.000	0	126.000.000	0	126.500.000		
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2	3				3				3			3

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0		35.000.000		0		0		0		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				118.475.000		125.000.000		125.500.000		126.000.000		126.500.000		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2	3	118.475.000	3	125.000.000	3	125.500.000	3	126.000.000	3	126.500.000		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				137.156.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		132.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kepeminatan Investasi (Investor)	3	6	137.156.000	7	110.000.000	8	120.000.000	9	130.000.000	10	132.500.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				137.156.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		132.500.000		
Dokumen Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (Dokumen)	3	3	137.156.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	3	132.500.000		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				137.156.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		132.500.000		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (Dokumen)	3	3	137.156.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	3	132.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				334.669.000		245.000.000		255.000.000		265.000.000		267.000.000		
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan pada Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I	100	100	285.912.000	100	205.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	100	216.000.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				334.669.000		245.000.000		255.000.000		265.000.000		267.000.000		
Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	2.250	5.000	285.912.000	5.250	205.000.000	5.500	210.000.000	5.750	215.000.000	6.000	216.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Secara Elektronik (Pelaku Usaha)													
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				285.912.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000		216.000.000		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.250	5.000	285.912.000	5.250	205.000.000	5.500	210.000.000	5.750	215.000.000	6.000	216.000.000		
Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan pada Substansi Pelayanan	100	100	48.757.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terpadu Satu Pintu II (%)													
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				334.669.000		245.000.000		255.000.000		265.000.000		267.000.000		
Dokumen Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	37	50	48.757.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	50.000.000	50	51.000.000		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				48.757.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		51.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	37	50	48.757.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	50.000.000	50	51.000.000		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				273.887.500		278.336.950		282.520.000		286.770.000		291.020.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	273.887.500	100	278.336.950	100	282.520.000	100	286.770.000	100	291.020.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				273.887.500		278.336.950		282.520.000		286.770.000		291.020.000		
Pelaku Usaha yang terfasilitasi Perizinan dan Pelaporan LKPM	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	15	15	273.887.500	15	278.336.950	15	282.520.000	15	286.770.000	15	291.020.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	860	860				860				860			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	30	30		30		30		30		30			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6.807.500		7.000.000		7.250.000		7.500.000		7.750.000		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	15	15	6.807.500	15	7.000.000	15	7.250.000	15	7.500.000	15	7.750.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)													
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha				201.770.000		203.770.000		205.770.000		207.770.000		209.770.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	860	860	201.770.000	860	203.770.000	860	205.770.000	860	207.770.000	860	209.770.000		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				65.310.000		67.566.950		69.500.000		71.500.000		73.500.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	30	30	65.310.000	30	67.566.950	30	69.500.000	30	71.500.000	30	73.500.000		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				126.015.000		130.000.000		132.500.000		135.000.000		135.000.000		
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	126.015.000	100	130.000.000	100	132.500.000	100	135.000.000	100	135.000.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non				126.015.000		130.000.000		132.500.000		135.000.000		135.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Database Perizinan yang dikelola dengan baik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.250	5.000	126.015.000	5.250	130.000.000	5.500	132.500.000	5.750	135.000.000	6.000	135.000.000		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				126.015.000		130.000.000		132.500.000		135.000.000		135.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.250	5.000	126.015.000	5.250	130.000.000	5.500	132.500.000	5.750	135.000.000	6.000	135.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)													
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				0		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				0		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelesatarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Diplomasi Kerjasama Dalam Negeri yang Aktif (Kerja Sama)	0	0	0	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				0		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Dokumen Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	0	0	0	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.08.5.07.0003 - Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya				0		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	0	0	0	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000		
Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	0	0	0	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000		
2.22.08.5.07.0007 - Publikasi Seni dan Budaya Daerah				0		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)	0	0	0	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	0	0	0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	2.18.0.00.0.00 .01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Inovasi Layanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Secara terperinci dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pelaksanaan Program Prioritas terkait dukungan terhadap program prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Program Prioritas
Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
			2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Mesin Lainnya 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
3.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Meningkatnya Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	1 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
6.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
7.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelesatarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Bidang Penanaman Modal	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0003 - Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	
			2.22.08.5.07.0007 - Publikasi Seni dan Budaya Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
			4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	

Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul. Seluruh program tersebut dilaksanakan guna mendukung pencapaian kinerja serta *core business* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Penanaman Modal atau Investasi serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah selanjutnya dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5
 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
1.	Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten/ Kota	Persen	31,23 %	0,70 %	0,80 %	0,90 %	1,00 %	1,10 %	1,20 %	FORMULASI PERHITUNGAN : $\frac{\{ \sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)} \}}{\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$ Sumber Data : Data LKPM dan Online Single Submission (OSS)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	84,93	84,98	85,03	85,08	85,13	85,18	85,23	FORMULASI PERHITUNGAN : $(\sum \text{Nilai Persepsi Per Unsur} / \sum \text{Total Unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$ Sumber Data : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terhadap pengguna layanan perizinan
3.	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Rupiah	825.653.585.722	831.433.160.822	838.084.626.109	845.627.387.744	854.083.661.621	863.478.581.899	873.840.324.882	FORMULASI PERHITUNGAN : $\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun (n)}$ Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan OSS Tipe Data : Non Kumulatif

Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 telah disusun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Indikator Kinerja Utama tersebut dinilai telah merepresentasikan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Bidang Penanaman Modal atau Investasi serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Bidang Urusan tersebut meliputi :

1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota.

Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten/Kota merupakan angka yang mengukur selisih antara nilai realisasi investasi tahun tertentu (tahun n) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya (tahun n-1) yang dinyatakan dalam satuan persen. Persentase peningkatan investasi Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pertumbuhan nilai investasi pada suatu daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan Investasi dapat diartikan sebagai :

- a. Iklim usaha yang kondusif atau membaik, karena adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu kawasan yang dinilai potensial.
- b. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong peningkatan produksi, infrastruktur serta inovasi.

Pada akhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ditetapkan target Peningkatan Investasi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,20 %.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan.

Nilai IKM dinilai mampu merepresentasikan atau menggambarkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Nilai IKM diperoleh dari pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara *online* yang dilakukan periodik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap Semester, dengan target responden masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Capaian Kinerja pada awal periode renstra atau baseline sebesar 84,93 dengan kategori Baik, yang diharapkan akan mampu terus mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra ditetapkan target sebesar 85,23 dengan kategori Baik.

3. Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul.

Realisasi Investasi menjadi salah satu elemen atau indikator penyusun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sesuai dengan Indikator Sasaran Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul. Nilai Realisasi Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Nilai Realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha dalam melaporkan semua kegiatan usahanya secara periodik serta data dari sistem Online Single Submission (OSS).

Capaian kinerja pada awal periode renstra atau baseline sebesar Rp. 825.653.585.722 yang diharapkan mampu untuk terus mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra ditetapkan target sebesar Rp. 873.840.324.882

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen vital dalam tata kelola pemerintahan modern. Sebagai alat ukur kinerja yang komprehensif, IKK memainkan peran krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah. IKK merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan. Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan penerjemahan serta interpretasi dari Tujuan dan Sasaran Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1.	Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten/ Kota	Positif	Persen	31,23 %	0,70 %	0,80 %	0,90 %	1,00 %	1,10 %	1,20 %	FORMULASI PERHITUNGAN : $\frac{\{\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}\}}{\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$ Sumber Data : Data LKPM dan Online Single Submission (OSS)

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ini mengacu dan berpedoman pada penyelarasan baik visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan program strategis yang akan dicapai sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen Renstra ini bertujuan untuk memantapkan sistem kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat lebih terarah, terpadu dan terencana secara sistematis yang akan bermuara pada pencapaian visi misi organisasi maupun daerah. Dokumen Renstra merupakan manifestasi dari tujuan maupun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ini akan digunakan sebagai dasar dan acuan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat tahunan. Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh kinerja seluruh lapisan dan elemen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian Renstra, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ini diharapkan dapat menjadi acuan serta pedoman untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Disamping itu, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan mampu menjalankan fungsi manajerial sebagai *planner*, *organizer* serta *controller* dalam rangka dukungan terhadap pencapaian Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Melalui dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Gunungkidul khususnya dari sektor investasi dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan selama periode perencanaan. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dapat membawa perubahan dan tantangan yang tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi *living document* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi yang ada, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip perencanaan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

KEPALA,



AGUNG DANARTA

✓ BUPATI GUNUNGKIDUL



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH